

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisasi, transparan dan akuntabel. Dimana Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda. Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai lembaga teknis yang berbentuk Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai provinsi yang baru terbentuk dalam kurun waktu yang relatif baru dibandingkan dengan provinsi lainnya, Provinsi Gorontalo tergolong masih dalam proses perkembangan di berbagai aspek. Oleh sebab itu, berbagai pihak yang terkait mulai dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terus berupaya untuk mengembangkan segala sektor kedaerahan seperti aspek ekonomi, pembangunan fasilitas daerah, perindustrian, perdagangan, politik hingga ketahanan dan keamanan daerah dan berbagai aspek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia disamping sumber daya alam yang terus dibenah.

Untuk itu sejalan dengan pengembangan berbagai aspek tersebut, perlu adanya suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Kehadiran kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo menjadi salah faktor yang dapat membantu pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam hal pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Dengan memperhatikan pentingnya pembangunan untuk kemajuan provinsi Gorontalo, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam pekerjaannya, penyusunan program pembangunan prasarana PU adalah suatu proses yang kompleks yang tidak hanya mempertimbangkan seperangkat kriteria penilaian yang berkaitan erat dengan pertimbangan kewilayahan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sektoral, dampak fungsional, dampak lingkungan, pendanaan dan keterpaduan fisik. Keterpaduan fisik ini adalah keterpaduan fisik yang bersifat sinergi baik secara fungsional, lokasi (ruang), waktu, besaran/volume, ataupun pendanaan maupun operasional.

Prasarana yang dibangun oleh dinas Pekerjaan Umum adalah prasarana wilayah dengan lingkup pelayanan suatu wilayah daerah, perkotaan bahkan sampai ketingkat provinsi seperti tercantum dalam Kepres 12 tahun 2000 yang dibatasi pembahasannya mencakup 8 prasarana yaitu: Jaringan Jalan, Jaringan

Telekomunikasi, Jaringan Listrik, Jaringan Jalan KA, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara, Jaringan Pengairan dan Air Bersih.

Di Provinsi Gorontalo sendiri Dinas Pekerjaan Umum telah ada, namun belum memenuhi standar minimal suatu kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Masalah yang sering ditemui antara lain adalah gedung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo belum bisa menampung seluruh aktivitas penyelenggaraan administrasi, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ditinjau dari segi penataan ruang, pola hubungan ruang, besaran ruang, sirkulasi serta kenyamanan, terutama pada bangunan gedung utama.

Demikian pula dengan konsep bangunan yang belum memenuhi konsep dasar mendirikan bangunan pemerintahan yang sesuai dengan keyakinan masyarakat adat Gorontalo. Dimana setiap bangunan pemerintahan harus disesuaikan dengan hukum adat istiadat yang selalu di junjung tinggi oleh masyarakat Gorontalo. Hal ini berkaitan erat dengan falsafah yang di pegang teguh oleh masyarakat gorontalo, yakni "*Adat bersendikan syara', Syara' bersendikan Qitabullah*". Keistimewaan ini terbentuk secara turun temurun karena Gorontalo merupakan daerah yang memiliki tingkat kebudayaan yang sangat tinggi dan menjunjung tinggi kehidupan beragama yang melandasi sistem kehidupan masyarakat di daerah ini.

Setelah memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dirasa perlu kiranya pemerintah provinsi untuk menyediakan fasilitas bangunan perkantoran yang memadai sesuai dengan fungsi bangunan yang tujuannya untuk membantu pemerintah di Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya

dengan baik khususnya dalam bidang pembangunan daerah.

Karenanya, dalam perancangan arsitektur ini penulis bermaksud mengangkat **Redesain Gedung Utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo** sebagai objek yang akan dirancang sesuai dengan kaidah perancangan arsitektural.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang akan timbul nantinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menampilkan ataupun menghadirkan desain bentuk fisik bangunan yang sesuai dengan fungsi dan karakter objek berdasarkan ilmu kearsitekturan?
2. Bagaimana merencanakan dan mendesain kembali gedung utama Dinas PU Provinsi Gorontalo yang memadai dan dapat menampung segala kegiatan dan aktifitas yang ada serta.
3. Bagaimana merencanakan dan menampilkan ruangan yang sesuai dengan program ruang, kebutuhan dan fungsi tiap ruang yang ada di gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, baik itu ruang dalam ataupun ruang luar, untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien.
4. Bagaimana Menentukan desain sistim sirkulasi dan tata masa yang baik pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum?

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu diadakannya redesain gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang telah ada sehingga menghasilkan desain kantor yang representatif dan teratur, sehingga mencapai penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien. Gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo tersebut harus layak digunakan dan dapat menampung semua kegiatan operasional yang dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan sehingga hasilnya dapat menunjang dan melaksanakan visi misi awal yang sudah dibuat.

### **C. Tujuan dan Sasaran Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan perancangan ini adalah untuk menyusun landasan konseptual dari Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan persyaratan teknisnya, memiliki penampilan menarik yang sesuai dengan fungsi dan karakter bangunan perkantoran yang ada di Gorontalo, kuat dari segi konstruksinya dan memiliki sistem utilitas yang baik sehingga dapat diaplikasikan kedalam bentuk desain untuk mendapatkan desain Gedung Utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang representatif, dan memadai.

#### **2. Sasaran Penulisan**

Adapun sasaran penulisan dari laporan ini adalah :

- Menyusun suatu acuan perencanaan gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang sesuai tuntutan dan fungsinya sehingga dapat diaplikasikan kedalam bentuk design.
- Menampilkan atau menghadirkan desain fisik bangunan yang mampu memberikan identitas gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
- Menganalisa dan menentukan desain struktur dan utilitas yang sesuai untuk gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.
- Mengatur dan mendapatkan penataan ruang juga besaran ruang yang sesuai standar dan aktifitas yang terjadi didalamnya.
- Melakukan penataan massa dan fasilitas pada gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo sehingga peralatan teknis bisa bekerja secara efektif.

Secara arsitektural, sasaran pembahasan/penulisan untuk mendapatkan secara terperinci mengenai hal-hal berikut:

- a. Konsep perancangan makro, meliputi:
  - Konsep analisa dan pemilihan lokasi dan site.
  - Konsep sirkulasi kendaraan.
  - Konsep pola penataan ruang Luar (*Landscape*).
- b. Konsep perancangan mikro, meliputi:
  - Konsep besaran dan kebutuhan ruang.
  - Konsep organisasi dan hubungan ruang.
  - Konsep sirkulasi dalam bangunan dan penampilan bangunan

- Konsep bentuk
- c. Konsep sistem utilitas dan perlengkapan bangunan, meliputi:
  - Konsep sistim air bersih.
  - Konsep sistim pembuangan.
  - Konsep pencahayaan.
  - Konsep pengamanan bangunan.
  - Konsep penghawaan/Pengkondisian Udara.
  - Konsep Struktur

#### **D. Lingkup Pembahasan**

Lingkup pembahasan dibatasi pada aspek-aspek arsitektur dalam perencanaan dan perancangan suatu desain gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo serta penambahan aspek lain secara garis besar yang berhubungan dengan pembahasan bahan dasar dan bahan pertimbangan, antara lain:

1. Perencanaan gedung utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang sesuai dengan kaidah ilmu kearsitekturan, mulai dari pengelompokkan ruang-ruang, sistem utilitas, penataan ruang luar, hingga estetika bangunannya dengan tetap memperhatikan fungsi bangunan itu sendiri.
2. Lingkup layanan berskala provinsi dengan pendekatan standar nasional maupun internasional.

## **E. Metode dan Sistematika Penulisan**

### **1. Metode Penulisan**

Metodologi yang digunakan sebagai titik tolak dalam perencanaan ada tiga cara antara lain:

- a. Dengan cara deskriptif. Tahap ini dimulai dengan pengumpulan data-data yang lebih di fokuskan pada objek perancangan. Kemudian studi literatur yang menyangkut faktor-faktor teknis dan persyaratan yang mempengaruhi dan sebaiknya ada pada perencanaan, yang di ambil dari berbagai sumber berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan Gedung Utama Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo. Selanjutnya data-data ini dianalisis merangkum hal-hal pokok kemudian dimasukkan dalam komponen pembahasan.
- b. Melakukan kunjungan dan wawancara dengan pihak terkait. Yaitu mengunjungi tempat yang menangani hal yang berkaitan dengan objek, kemudian mewawancarainya. Hasil wawancara inilah yang dapat dijadikan sumber data tambahan.
- c. Melakukan studi komparasi yaitu mencari serta mengumpulkan data-data yang berasal dari internet maupun dengan melakukan pengamatan atau observasi langsung di lapangan terhadap bangunan-bangunan sejenis yang sudah ada atau bangunan lain yang ada hubungannya



dengan objek rancangan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang bisa diterapkan pada perencanaan obyek, menyangkut aspek teknis dan aspek desain pada Gedung Utama Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

## **2. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan adalah dengan mengemukakan gambaran secara garis besar tentang isi penulisan yang dituangkan pada setiap babnya yaitu:

**BAB I :** Adalah merupakan tahap pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penulisan, lingkup pembahasan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Merupakan tahap deskripsi objek desain secara umum sebagai suatu pendekatan. Berisikan telaah tinjauan pustaka yang mengungkapkan kerangka acuan komprehensif yang terdiri dari aspek non fisik berupa pengetahuan, tujuan dan status proyek serta studi banding terhadap objek yang sejenis.

**BAB III :** Memuat konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan/menghasilkan rancangan produk yang diharapkan berupa tata ruang makro maupun tata ruang mikro.

**BAB IV :** Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang disertai dengan daftar rujukan lampiran dari hasil perencanaan desain.